



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS SEBELAS MARET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRWAN TRINUGROHO
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN, KERJASAMA,
INTERNASIONALISASI, DAN INFORMASI
3. NHK : 899726

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m²/45 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 272.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. MOTOR, HONDA NF 125 SD Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 66.750.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 5.010.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.352.158.164

F. HARTA LAINNYA Rp. 125.000.000

Sub Total Rp. 4.320.918.164

III. HUTANG Rp. 61.793.785

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.259.124.379

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik



Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.